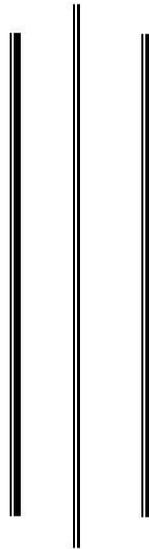


PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2024**



**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

Pada penyusunan LAKIP ini disajikan beberapa penjelasan tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dalam Pencapaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menganalisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta menganalisis Program/Kegiatan dan Realisasi Anggarannya yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dengan penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini dapat menjadi perbaikan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu kami mengharapkan petunjuk dan bimbingan yang sifatnya memperbaiki untuk kesempurnaan laporan ini.

Pematangsiantar,

2025

KEPALA DINAS,



SOEFIE M. SARAGIH, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19770415 199612 2 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar selaku Organisasi Perangkat Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar. Sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kota/kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam salah satu pasal pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

#### **1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
  - a) Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

- dari Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

### **Tugas Dan Fungsi**

**Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Perencanaan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pembinaan, pengendalian, koordinasi,fasilitas dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

1. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, urusan rumah tangga dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan.
2. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
  - a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
  - b. Pelaksanaan, pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga, dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan asset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas.

- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas
  - d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang lingkungan Dinas
  - e. Pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikannya oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
- a. Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ketatausahaan, pengadaan surat menyurat, pendistribusian dan pengarsipan surat menyurat, hubungan masyarakat di lingkungan Dinas,
  - b. Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, investasi asset di lingkungan Dinas;
  - c. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian, koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

## **2. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dapat dilihat dalam tabel berikut.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Pematangsiantar

| No | Masalah Pokok  | Masalah  | Akar Masalah  |
|----|--|--|---|
| 1  | Belum optimalnya Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar | Realisasi Penanaman Modal dan Investasi masih rendah | <p>Promosi Penanaman Modal belum terlaksana</p> <p>Regulasi yang mendukung meningkatnya iklim investasi atau penanaman modal yang belum ada.</p> <p>Kerjasama antar lintas sektor belum ada</p> <p>Perda RDTR masih dalam proses</p> <p>Jumlah Sumber Daya Manusia belum memadai.</p> |

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

| No | Sasaran Strategi/<br>Kinerja Utama                             | Indikator Kinerja Kunci  | Target            |
|----|--|--|-------------------|
| 1  | Meningkatnya Realisasi Investasi                               | Realisasi Investasi  | 7.048.226.522.689 |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu             | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan PTSP | 91                |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran | Inovasi Perangkat Daerah                                       | 1                 |
|    |  | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                    | B                 |



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan OPD yaitu dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kota Pematangsiantar.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA

#### 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, berikut kami samapiam rekap Perbandingan target dan Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2024 sebagai berikut

#### CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tabel Capaian IKU Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama                             | Target            | Realisasi         |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1  | Inovasi Perangkat Daerah                            | 1                 | 1                 |
| 2  | Capaian AKIP Perangkat Daerah                       | B                 | B                 |
| 3  | Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP             | 1.590             | 7.016             |
| 4  | Nilai Realisasi Investasi                           | 7.048.226.526.689 | 8.246.157.584.069 |
| 5  | Nilai Rencana Penanaman Modal                       | 1.366.555.154.614 | 2.877.424.851.294 |
| 6  | Jumlah Investor                                     | 2.408             | 5.213             |
| 7  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | 87,88             | 94,54             |
| 8  | Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan | 100               | 100               |

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar di Tahun 2024 memiliki 5 sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk Indikator ini adalah Skor 94,54 dengan Mutu Pelayanan B atau Sangat Baik.

**1. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

| No | Indikator Kinerja Utama                             | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 |
|----|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Inovasi Perangkat Daerah                            | 1                 | 1                    |                      |                      |                      |
| 2  | Capaian AKIP Perangkat Daerah                       | B                 | B                    |                      |                      |                      |
| 3  | Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP             | 1.590             | 7.016                | 1,893                | 1.383                | 1.701                |
| 4  | Realisasi Investasi                                 | 7.048.226.526.689 | 8.246.157.584.069    | 1.995.821.879.633    | 10.829.767.571.077   | 8.985.762.671.405    |
| 5  | Nilai Minat Penanaman Modal                         | 1.366.555.154.614 | 2.877.424.851.294    | 140.534.521.176      | 10.829.767.571.077   | 8.985.762.671.405    |
| 6  | Jumlah Investor                                     | 2.408             | 5.213                | 24,87                | 5.047                | 5.047                |
| 7  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | 87,93             | 94,54                | 91,78                | 87,77                | 88,96                |
| 8  | Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan | 100               | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |

*Sumber data : Data Capaian Kinerja Tahun 2021-2024*

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Capain kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pematangsiantar dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahun 2022-2027 Kota Pematangsiantar seperti pada table berikut :

| No. | Indikator   | Target 2024       | Realisasi Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 | Target Tahun 2027 |
|-----|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) | (2)   | (4)               | (4)                  | (4)               | (4)               | (4)               |
| 1   | Inovasi Perangkat Daerah                            | 1                 | 1                    | 1                 | 1                 | 1                 |
| 2   | Capaian AKIP Perangkat Daerah                       | B                 | B                    | B                 | B                 | B                 |
| 3   | Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP             | 1.590             | 7.016                | 1.623             | 1.656             | 1.689             |
| 4   | Nilai Realisasi Investasi                           | 7.048.226.526.689 | 8.246.157.584.069    | 198.968.000       | 214.377.000       | 260.151.003       |
| 5   | Nilai Rencana Penanaman Modal                       | 1.366.555.154.614 | 2.877.424.851.294    | 1.393.886.257.706 | 1.421.763.982.860 | 1.450.199.262.517 |
| 6   | Peningkatan Jumlah Investor                         | 2.408             | 5213                 | 3.010             | 3.612             | 4.214             |
| 7   | Indeks Kepuasan Masyarakat                          | 87,93             | 94,54                | 87,98             | 88.03             | 88.08             |
| 8   | Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan | 100               | 100                  | 100               | 100               | 100               |

### 3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Tidak ada standar Nasional terhadap indikator kinerja yang ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pematangsiantar sehingga tidak dapat dilakukan analisis perbandingan.

### 3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dalam melakukan Pelayanan Administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh sumber daya yang baik, baik itu dari Sumber Daya Manusia, maupun sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana yang baik dan cukup, walaupun masih membutuhkan tambahan sarana dan prasarana seperti Mobil Pelayanan Keliling dan tambahan jumlah pegawai.

Pada Tahun 2024, seluruh Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu kepada masyarakat secara offline telah dialihkan ke Mal Pelayanan Publik Kota Pematangsiantar. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses informasi secara online melalui e-mail [dpmpstp@pematangsiantar.go.id](mailto:dpmpstp@pematangsiantar.go.id) dan website <https://dpmpsts.pematangsiantar.go.id> serta dapat melakukan permohonan pelayanan perizinan menggunakan aplikasi perizinan secara online melalui [simponi.pematangsiantar.go.id](http://simponi.pematangsiantar.go.id), [oss.go.id](http://oss.go.id) serta [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id).

### 3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar didukung oleh 31 personil pegawai ASN dan 3 THL dengan kategori sebagai berikut:

a. Ditinjau dari golongan

| NO    | GOLONGAN | JENIS KELAMIN |           | TOTAL |
|-------|----------|---------------|-----------|-------|
|       |          | PEREMPUAN     | LAKI-LAKI |       |
| 1.    | IV/c     | 1             | -         | 1     |
| 2.    | IV/b     | -             | 1         | 1     |
| 3.    | IV/a     | 1             | 3         | 4     |
| 4.    | III/d    | 8             | 3         | 11    |
| 5.    | III/c    | 1             | 1         | 2     |
| 6.    | III/b    | 2             | -         | 2     |
| 7.    | III/a    | 4             | 3         | 7     |
| 8.    | II/d     | -             | 2         | 2     |
| TOTAL |          | 17            | 14        | 31    |

b. Ditinjau dari pendidikan formal :

| NO    | GOLONGAN      | JENIS KELAMIN |           | TOTAL |
|-------|---------------|---------------|-----------|-------|
|       |               | PEREMPUAN     | LAKI-LAKI |       |
| 1.    | Strata 2 (S2) | 4             | 4         | 8     |
| 2.    | Strata 1 (S1) | 11            | 11        | 22    |
| 3.    | D3            | -             | -         | -     |
| 4.    | SLTA          | 3             | 3         | 7     |
| TOTAL |               | 18            | 19        | 31    |

c. THL Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| NO    | GOLONGAN | JENIS KELAMIN |           | TOTAL |
|-------|----------|---------------|-----------|-------|
|       |          | PEREMPUAN     | LAKI-LAKI |       |
| 1.    | SLTA     | 1             | 2         | 3     |
| TOTAL |          | 1             | 2         | 3     |
|       |          |               |           |       |

### **3.1.5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung capaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - c. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
    - Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
  - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegritas secara Elektronik.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    - Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha

- Pengawasan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2024 melaksanakan Program sebanyak 3 Program, 10 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan.

### 3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel Realisasi Program Per Indikator Kinerja

| No                        | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                   | Program/Kegiatan   | Anggaran             | Realisasi            | Capaian (%)  |
|---------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4  | 5                    | 6                    | 7            |
| 1                         | Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran | Inovasi Perangkat Daerah                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 5.188.882.833        | 4.560.559.881        | 94,25        |
|                           |  | Capaian AKIP Perangkat Daerah                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 4.067.519.215        | 3.549.914.876        | 87,28        |
|                           |  |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 603.043.566          | 566.297.666          | 93,90        |
|                           |  |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 417.336.300          | 356.513.766          | 94,54        |
|                           |  |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100.983.750          | 87.833.773           | 86,99        |
| 2                         | Kemudahan Berusaha   | Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP             | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal   | 0                    | 0                    | 0            |
| Nilai Realisasi Investasi |  |   |  |                      |                      |              |
| 3                         | Efektifitas Promosi Penanaman Modal                            | Nilai Rencana Penanaman Modal                       | Program Promosi Penanaman Modal  | 0                    | 0                    | 0            |
|                           |  | Peningkatan Jumlah Investor                         |  |                      |                      |              |
| 4                         | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                    | Program Pelayanan Penanaman Modal  | 1.484.225.634        | 1.359.006.762        | 91,56        |
|                           |  |   | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.484.225.634        | 1.359.006.762        | 91,56        |
| 5                         | Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal   | 398.459.000          | 341.642.356          | 85,74        |
|                           |  |   | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | 398.459.000          | 341.642.356          | 85,74        |
| <b>Jumlah Seluruhnya</b>  |  |   |  | <b>7.071.567.467</b> | <b>6.261.208.999</b> | <b>88,54</b> |

**TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN ANGGARAN**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                   | Kinerja           |                   |             | Anggaran      |               |             |
|----|--|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|    |  |   | Target            | Realisasi         | Capaian (%) | Target        | Realisasi     | Capaian (%) |
| 1  | 2  | 3   | 5                 | 6                 | 7           | 8             | 9             | 10          |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran | Inovasi Perangkat Daerah                            | 1                 | 1                 | 100         | 5.188.882.833 | 4.560.559.881 | 94,25       |
|    |  | Capaian AKIP Perangkat Daerah                       | B                 | B                 | 100         | 5.188.882.833 | 4.560.559.881 | 94,25       |
| 2  | Kemudahan Berusaha   | Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP             | 1.590             | 7.016             | 441,26      | 00            | 0             | 0           |
|    |  | Nilai Realisasi Investasi                           | 7.048.226.522.689 | 8.246.157.584.069 | 117         | 0             | 0             | 0           |
| 3  | Efektifitas Promosi Penanaman Modal                            | Nilai Rencana Penanaman Modal                       | 1.366.555.154.614 | 2.877.424.851.294 | 210,56      | 0             | 0             | 0           |
|    |  | Peningkatan Jumlah Investor                         | 2.408             | 5.213             | 216,49      | 0             | 0             | 0           |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                    | 87,93             | 94,54             | 107,52      | 1.484.225.634 | 1.359.006.762 | 91,56       |
| 5  | Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan | 100               | 100               | 100         | 398.459.000   | 341.642.356   | 85,74       |

**TABEL EFISIENSI PER INDIKATOR KINERJA**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                   | Capaian Kinerja (%) | Capaian Anggaran (%) | Efisiensi (%) |
|----|--|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                   | 5                    | 6             |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran | Inovasi Perangkat Daerah                            | 100                 | 94,25                | 94,25         |
|    |  | Capaian AKIP Perangkat Daerah                       | 100                 | 94,25                | 94,25         |
| 2  | Kemudahan Berusaha   | Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP             | 441,26              | 0                    | 91,56         |
|    |  | Nilai Realisasi Investasi                           | 117                 | 0                    | 91,56         |
| 3  | Efektifitas Promosi Penanaman Modal                            | Nilai Minat Penanaman Modal                         | 210,56              | 0                    | 91,56         |
|    |  | Peningkatan Jumlah Investor                         | 216,49              | 0                    | 91,56         |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                    | 107,52              | 91,56                | 91,56         |
| 5  | Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan | 100                 | 85,74                | 85,74         |

### 3.2 REALISASI PROGRAM TAHUN 2024

Realisasi Anggaran OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk Tahun Anggaran 2024 seperti tersebut dibawah ini :

| NO       | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN   | ALOKASI<br>ANGGARAN  | REALISASI (Rp)       | (%)          | SUM BER<br>DANA |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>Program Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>   | <b>5.188.882.833</b> | <b>4.890.632.629</b> | <b>94,25</b> | <b>DAU</b>      |
| 1        | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | 4.067.519.215        | 3.549.914.676        | 87,28        | DAU             |
| a        | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | 4.067.519.215        | 3.549.914.676        | 87,28        | DAU             |
| 2        | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah   | 603.043.566          | 566.297.666          | 93,90        | DAU             |
| a        | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan Bangunan<br>Kantor  | 4.074.334            | 3.908.000            | 95,91        | DAU             |
| b        | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   | 181.973.428          | 174.258.200          | 95,76        | DAU             |
| c        | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga  | 33.290.968           | 32.967.800           | 99,02        | DAU             |
| d        | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | 49.654.560           | 43.567.300           | 87,74        | DAU             |
| e        | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan   | 89.458.278           | 82.017.867           | 91,68        | DAU             |
| f        | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD  | 244.492.000          | 229.578.499          | 93,90        | DAU             |
| 3        | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah  | 417.336.300          | 356.513.766          | 85,42        | DAU             |
| a        | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat   | 2.781.000            | 2.640.000            | 94,92        | DAU             |
| b        | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik   | 51.405.300           | 30.308.358           | 58,95        | DAU             |
| c        | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor  | 363.150.000          | 323.565.408          | 89,09        | DAU             |
| 4        | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | 100.983.750          | 87.833.773           | 86,99        | DAU             |
| a        | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | 77.840.000           | 71.108.773           | 91,35        | DAU             |

|          |  |                      |                      |              |            |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| b        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 23.143.750           | 16.725.000           | 72,26        | DAU        |
| <b>B</b> | <b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>   | <b>1.484.225.634</b> | <b>1.359.006.762</b> | <b>91,56</b> | <b>DAU</b> |
| 1        | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.484.225.634        | 1.359.006.762        | 91,56        | DAU        |
| a        | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik. | 1.484.225.634        | 1.359.006.762        | 91,56        | DAU        |
| <b>C</b> | <b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>  | <b>398.459.000</b>   | <b>341.642.356</b>   | <b>85,74</b> | <b>DAK</b> |
| 1        | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | 398.459.000          | 341.642.356          | 85,74        | DAK        |
| a        | Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha   | 300.252.075          | 273.224.318          | 90,99        | DAK        |
| b        | Pengawasan Penanaman Modal   | 98.206.925           | 68.418.040           | 69,66        | DAK        |
|          | <b>JUMLAH</b>  | <b>7.071.567.467</b> | <b>6.261.208.999</b> | <b>88,54</b> |            |

*Sumber data : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar 2024*

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2024 merupakan Tahun awal dari Rencana Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis 5 Sasaran Strategis dengan 8 indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Tahun 2024 Indikator tersebut diatas telah tercapai dengan baik.

### **4.2 SARAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pematangsiantar untuk dapat lebih meningkatkan Pelayanan Administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar bagi masyarakat masih membutuhkan tambahan jumlah sumber daya manusia atau pegawai dan anggaran untuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pematangsiantar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2024, untuk kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pematangsiantar,

2025

KEPALA DINAS



SOEFIE M. SARAGIH, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19770415 199612 2 00